

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu klasik dalam perekonomian yang menjadi perhatian para akademisi, pengambil kebijakan dan politisi diseluruh dunia adalah kemiskinan. Banyaknya program dan kebijakan yang sudah dilaksanakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan belum juga memberikan dampak signifikan, seperti masih tingginya angka kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang belum mereda, disparitas perkotaan dan pedesaan yang masih tinggi, kemiskinan yang berkaitan dengan gender, dan penduduk miskin masih terbatas dalam mengakses pelayanan publik (Hadna & Kartika, 2017).

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang terkenal di dunia adalah bantuan transfer tunai bersyarat “Progresa” dimulai di Mexico di tahun 90an yang kemudian diikuti oleh berbagai negara berkembang di seluruh dunia. Program ini memberikan bantuan tunai secara teratur kepada rumah tangga miskin, tetapi syaratnya harus dibelanjakan untuk hal-hal tertentu seperti untuk investasi modal manusia pada anak-anak mereka yang masih kecil. Kondisi ini biasanya dimulai sebelum kelahiran dan persalinan oleh bidan terlatih atau dokter biasanya kondisi dan berlanjut melalui investasi kesehatan anak usia dini (imunisasi, pemantauan pertumbuhan) dan pendaftaran di sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Cahyadi et al., 2020).

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah program bantuan Transfer tunai bersyarat mampu mengurangi kemiskinan dalam rumah tangga dan

apakah bantuan bersyarat ini lebih efektif dan lebih baik dari bantuan tidak bersyarat? Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan banyak mengadopsi bantuan tunai yang tidak bersyarat (Del Boca et al., 2021) meskipun program bantuan tunai tidak bersyarat ini kurang umum.

Adapun di pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sendiri optimis dapat menurunkan angka kemiskinan di Bone Bolango seperti yang di jelaskan pada Tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di
Bone Bolango**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah penduduk Miskin (ribuan)	Presentase Penduduk Miskin (persen)
2015	304,627	28,19	18,49
2016	327,354	27,80	17,97
2017	339,614	27,91	17,81
2018	363,982	27,61	17,40
2019	380,029	25,91	16,12

Sumber: BPS Bone Bolango 2019

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini masih dirasa belum cukup untuk memberikan pengaruh yang besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembagunan nasional mengenai masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikatakan masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Untuk itu, terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah mengadakan sebuah program khusus yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan atau yang disingkat

dengan PKH. Sementara itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah juga melakukan segala upaya dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Dalam hal ini, Masalah kemiskinan dari berbagai aspek seperti aspek kesehatan, aspek Pendidikan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, serta aspek-aspek lainnya.

Pada hakikatnya, masyarakat yang tergolong miskin memiliki sebuah kelemahan dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka serta kemampuan dan kemauan untuk berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Oleh karena itu perlu adanya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Program (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepersetaan dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos RI, 2015: 2). PKH ini sendiri memiliki tujuan dan sasaran, Sasaran dari Program ini yaitu mengutamakan keluarga sangat miskin (KSM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta Progsam Keluarga Harapan (PKH) harus tercover pada fasilitas pendidikan dan kesehatan terdekat. Di bidang kesehatan, Peserta PKH memiliki kewajiban untuk rutin memeriksa kandungan bagi ibu hamil dan untuk anak bayi wajib untuk mendapatkan pemberian asupan gizi, imunisasi serta rutin menimbang badan anak balita guna mengetahui

perkembangan berat badan anak. Sedangkan untuk bidang Pendidikan, diwajibkan dan dipastikan untuk mendaftarkan anggota keluarga yang tercover dalam program PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya (Kemensos RI, 2015: 12). Untuk keluarga yang termasuk dalam PKH dikenal dengan rumah tangga sangat miskin (RTSM), adapun alasan untuk tidak melanjutkan sekolah ialah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup dan tidak mampu membiayai perawatan kesehatan bagi anggota keluarga akibat rendahnya tingkat pendapatan.

Untuk mencegah penyalahgunaan dana, misalnya uang bantuan digunakan untuk keperluan yang bersifat hura-hura, contohnya dana bantuan digunakan buat kesalon, shopping, dan lain sebagainya ini bukan menjadi harapan atau tujuan Program keluarga Harapan (PKH). Dana bantuan yang telah diberikan menjadi hak sepenuhnya bagi penerima untuk merubah berbagai permasalahan hidup yang dialaminya, dan untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan, pengawasan penggunaan dana ini diawasi oleh kelembagaan. Pada level Nasional dibentuk Tim Koordinasi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH Pusat), sampai pada level Kabupaten terdapat Tim Koordinasi dan Unit Pelaksanaan Program Keluarga Kabupaten. Dalam Program keluarga harapan ini, dilakukan pembekalan kepada peserta PKH. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta PKH untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dalam mensejahterakan hidup mereka. Kesulitan yang dihadapi oleh peserta PKH saat ini,

yaitu kurangnya keyakinan dan percaya diri dalam menghadapi kehidupan secara mandiri. Peserta yang tercover dalam Program Keluarga Harapan adalah orang miskin yang hidupnya dibawah rata-rata. Untuk itu, Program keluarga harapan ini diharapkan dapat membimbing warga miskin yang pendidikannya lemah serta kurang memperhatikan standar kesehatannya.

Tabel 1.2
Jumlah PKH Desa Lonuo Kec.Kabila Penerima Bantuan
PKH 2015-2019

NO	Tahun	RTSM/KSM
1	2015	86
2	2016	82
3	2017	78
4	2018	62
5	2019	62

Sumber Data: kantor Desa Lonuo 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta penerima bantuan PKH berkurang setiap tahun dan mereka yang awalnya terdaftar sebagai penerima bantuan dan akhirnya tidak lagi menjadi anggota PKH beramereka tidak masuk lagi dalam kategori bantuan karena tidak ada lagi anggota keluarganya yang masuk dalam kriteria Program keluarga Harapan (PKH) yaitu pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan Telah membantu mereka sampai anak-anak mereka dapat menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Dengan adanya PKH di kabupaten Bone Bolango di harapkan dapat menanggulangi angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas di berbagai sektor. Ada lima hal yang menjadi prioritas kabupaten Bone Bolango hingga tahun 2021. Pertama program rakyat miskin dan pembangunan desa, yang kedua adalah akses dan proritas layanan pendidikan, ketiga peningkatan dan kecakupan layanan

kesehatan, keempat percepatan pertumbuhan ekonomi dan terakhir pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan.

Program keluarga Harapan (PKH) dalam upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut dengan memberikan bantuan secara tunai dan non tunai. Sering dilakukan juga pembekalan agar masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan sendirinya, bantuan tunai dan non tunai tersebut diharapkan dapat membantu biaya sekolah dan jaminan kesehatan.

Selain pembekalan, dilakukan juga pelatihan-pelatihan yang bertujuan agar masyarakat penerima bantuan memiliki keahlian atau skill dalam keterampilan mereka untuk dapat menghasilkan sebuah barang yang bisa menghasilkan uang, seperti pembuatan tas, mengolah barang-barang bekas, daur ulang sampah plastic, memproduksi cemilan-cemilan, dan pembuatan pernak-pernik lainnya. Dan juga peserta Program Keluarga Harapan di bekali cara memasarkannya produk-produk yang dibuatnya agar produk yang dibuat yaitu terus berkembang dan dapat mandiri. Pelatihan ini diberikan agar supaya masyarakat miskin tidak akan ketergantungan dengan bantuan tersebut dan bisa mandiri untuk memperoleh pendapatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepada peserta Program keluarga Harapan disadari dengan tujuan yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Oleh karena itu, peserta diberi bimbingan penyuluhan agar program berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh pemerintah. Dengan adanya bimbingan penyuluhan yang diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan, agar merubah gaya hidup mereka yang semua menjadi miskin lama kelamaan dengan

adanya Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi harapan pemerintah yang sebenarnya.

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial yang ditindak lanjuti dengan Perpes Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya membangun sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan.

Tabel 1.3 Data Kemiskinan Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila

Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020

No	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin
1.	341 Rumah Tangga yang tersebar di 3 dusun	84 Rumah Tangga Miskin : Dusun I: 37 Ruta Miskin Dusun II: 15 Ruta miskin Dusun III: 32 Ruta Miskin

Sumber Data: kantor Desa Lonuo 2021

Berdasarkan data kemiskinan Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tahun 2020. Terdapat 341 rumah tangga yang tersebar di 3 dusun. 84 rumah tangga miskin yang tersebar di dusun 1 Sebanyak 37 rumah tangga miskin, Dusun II terdapat 15 rumah tangga miskin dan dusun III sebanyak 32 rumah tangga miskin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini menjadi informasi tentang Program Keluarga Harapan di masyarakat dan faktor-faktor penyebab kemiskinan di desa Lonuo yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, sebagai informasi dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan tentang Program Keluarga Harapan dalam upaya mengatasi kemiskinan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, bagi bahan referensi informasi dan acuan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam menempuh jenjang sarjan